

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian: Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Devi Meyliana Savitri Kumalasari, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013).
- Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- M. Chatib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).
- Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia Serfiyanti, dan Iswi Haryani, *Sukses Bisnis Ritel Modern*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013).
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1968).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Zaeni Asyhadie dan Arief rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013).

Jurnal

Endi Sarwoko, “*Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang*”, Jurnal Ekonomi Modernisasi, Volume 4, Nomor 2, Juni 2008.

Euis Soliha, “*Analisis Industri Ritel di Indonesia*” Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2008.

Made Emy Andayani Citra, I Wayan Wijana, “*Pengaturan Hukum Toko Modern Waralaba Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional di Kota Denpasar*” Jurnal Advokasi, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015.

Marcel Seran, “*Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan*” Jurnal MMH, Jilid 43, Nomor 3, Juli 2014.

Monica Balqis, “*Faktor-Faktor Penghambat Ritel Berjaringan Masuk ke Kota Padang sampai Tahun 2017*” Jurnal Politik, Volume 3, Nomor 2, Februari 2018.

Muflihatul Fauza, “*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Ritel Tradisional dalam Menghadapi Ritel Modern di Kecamatan Medan Amplas*” Jurnal At-Tawassuth, Volume 2, Nomor 1, tahun 2017.

Rushan, “*Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Moderen Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional di Kabupaten Bekasi*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewiraushaaan “Optimal” Volume 10, Nomor 2, September 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicapai untuk Usaha Kecil dan Bidang/jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah dan Besar dengan Syarat Kemitraan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar

Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Mekanisme Proses Penerbitan Perizinan di Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang

Wawancara

Jasman, Sekertaris Dinas Perdagangan Kota Padang (Padang: 29 Maret 2019).

Nurdiman, Pedagang di Pasar Raya Kota Padang (Padang: 4 April 2019).

Aini, Pedagang di Pasar Raya Kota Padang (Padang: 4 April 2019).

Novery, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Padang (Padang: 20 Mei 2019).